

STRATEGI TERWUJUDNYA PERTAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI TERCAPAINYA KEDAULATAN PANGAN DAN KESEIMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

Roosganda Elizabeth

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jl.A.Yani.No.70. Bogor.
roosimanru@yahoo.com

ABSTRAK

Keseimbangan dan keberpihakan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan, terkait erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kedaulatan pangan, serta mempengaruhi keberhasilan terwujudnya ketahanan pangan, yang mengindikasikan keeratan hubungan antara kemiskinan, kelaparan dan pertahanan pangan nasional. Kecukupan dan kemampuan mencukupi kebutuhan pangan masyarakat merupakan upaya dan program kebijakan yang berkelanjutan, meski mengindikasikan keniscayaan dalam kesinambungannya bila pemerintah mengabaikan keberpihakan terhadap perekonomian masyarakat pertanian dan pedesaan. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup (kualitas, kuantitas, dan gizi), yang diwujudkan melalui peran serta dan manajemen fungsi-fungsi penyediaan dan distribusi dan keterlibatan peran para pelaku usaha produksi, distribusi dan jasa dibidang pangan serta konsumsi pangan dan gizi. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi yang terkait ketersediaan, kontinuitas dan diversifikasi pangan serta mengkaji strategi program pencapaian ketahanan pangan dengan terkait dengan aspek kelembagaan masyarakat dan pedesaan. Dengan menggarisbawahi cukup baiknya dan sangat mendukungnya potensi sumberdaya alam, tenaga kerja, dan lingkungan di wilayah pedesaan, maka terealisasinya pengembangan pertanian dan peternakan melalui sistem pertanian terpadu baik organik maupun spesifik lokal dengan mengintegrasikan tanaman dan peternakan bukanlah hal yang mustahil. Pentingnya kecukupan pangan mencerminkan keberpihakan pemerintah akan perbaikan keseimbangan ekonomi masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan, meski kesinambungan dan keberlanjutannya masih suatu keniscayaan, nantinya.

Kata kunci : pertahanan pangan nasional, strategi, kedaulatan pangan, keseimbangan ekonomi pedesaan.

ABSTRACT

Balance and bias of the local economy, especially in rural areas, is closely linked to poverty alleviation and food sovereignty, and to influence the success of the realization of food security, which indicates the relationship between poverty, hunger and food defense nationwide. Sufficiency and the ability to meet food needs of society is an effort and a sustainable policy program, although indicating the

necessity of the continuity if the government ignores the favor of the agricultural and rural economy of the community. Food security is defined as the requirement for sufficient food (quality, quantity, and nutrition), which is realized through the participation and management functions of the supply and distribution and the involvement of the role of businesses of production, distribution and services in the field of food and food consumption and nutrition. This paper aims to identify the associated availability, kontinuitas and diversification as well as reviewing the program strategy with the achievement of food security related to the institutional aspects and rural communities. By highlighting good enough and it supports the potential of natural resources, labor, and the environment in rural areas, the realization of agricultural and livestock development through integrated farming systems both organic and locally specific by integrating crops and livestock is not impossible. The importance of food security reflects the concern of the government would repair the economic balance of society to the realization of food security, despite the continuity and sustainability is still a necessity, later.

Keywords: national food strategies defense, food sovereignty, the rural economy balance

PENDAHULUAN

Terdapat dan terimplementasikannya berbagai program kebijakan pembangunan pertanian secara nasional dapat memperkuat kedudukan petani. Bila pengelolaan pertanian dan peternakan yang baik dan sesuai dapat dipertahankan, maka hasil dan produksinya diharapkan dapat mencukupi akan kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Pada kenyataannya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran relatif tidak berkurang. Liberalisasi sektor pangan belum mampu membuka peluang kerja, peluang usaha dan mendorong masyarakat miskin untuk berusaha di bidang pangan. Sektor penyedia bahan pangan menghadapi beban ganda (terkait masalah gizi kurang dan gizi lebih), yang dari indikator kesejahteraan rakyat secara makro masih menjadi problem sebagian besar masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (Sofjan. 2000).

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi yang terkait ketersediaan, kontinuitas dan diversifikasi pangan serta mengkaji strategi program pencapaian ketahanan pangan dengan terkait dengan aspek kelembagaan masyarakat dan perdesaan. Dengan penajaman aspek prioritas dan implementasi berbagai program peningkatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi ketimpangan kekurangan produksi dan kelebihan ketersediaan komoditas pangan unggulan dalam hal mutu, jumlah dan diversifikasi, diharapkan dapat meluncurkan pencapaian pertahanan pangan. Secara umum kompleksitas masalah pangan dan gizi semakin berkembang sehingga diversifikasi pangan dan gizi yang diyakini merupakan terobosan perbaikan konsumsi pangan, namun belum terealisasi dengan baik.

DIVERSIFIKASI PANGAN, STRATEGI JITU PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DALAM KETERBATASAN EKONOMI MASYARAKAT

Pencapaian terwujudnya ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan nasional, merupakan yang utama dan strategis yang menjadi tolok ukur berhasil tidaknya pelaksanaan program kebijakan pembangunan pertanian (Elizabeth. 2007). Pembangunan pertanian termasuk pengembangan implementasi diversifikasi pangan asal pertanian dan peternakan, mengembangkan kelembagaan pangan yang efektif dan akurat, serta mengembangkan usaha produk olahan berbasis produk pertanian dan produk peternakan.

Kajian deskriptif terhadap pendapatan dari hasil pertanian dan peternakan selama setahun adalah: padi, jagung, kacang, dan singkong, sedangkan dari hasil peternakan (sapi potong, kerbau, kambing, domba), serta umur, pengalaman bertani atau beternak, pendidikan, jumlah anggota keluarga yang membantu dan jumlah ternak yang dipelihara petani ternak terlihat pada Tabel.1

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan dari Hasil Pertanian dan Peternakan, Umur, Pengalaman Bertani atau Beternak, dan Pendidikan

Uraian	Rata-rata $\pm$ Sd
Pendapatan pertanian/tahun (Rp.juta)	11,15 $\pm$ 1,94
Pendapatan ternak/tahun (Rp.juta)	10,65 $\pm$ 1,88
Umur (tahun)	44,76 $\pm$ 8,39
Pengalaman beternak/bertani (tahun)	23,16 $\pm$ 8,84
Pendidikan formal (tahun)	4,88 $\pm$ 3,91
Jumlah anggota keluarga yang membantu (orang)	4,05 $\pm$ 0,75

Uraian pada Tabel 1 secara sederhana mencerminkan rata-rata pendapatan petani di berbagai daerah dengan rata-rata luasan areal pertanaman yang relatif sempit (0,1-0,5Ha) dari hasil pertanian sebesar Rp.11,15 juta/tahun setara dengan 0,91 juta/bulan dan ternak 10,65 juta/tahun atau setara dengan Rp. 0,87 juta/bulan, dimana pendapatan tersebut merupakan pendapat yang diperoleh dari usaha bercocok tanam dan beternak. Rendahnya tingkat pendidikan petani responden menunjukkan bahwa penerimaan teknologi inovasi yang diterima kurang terpahami tetapi dari pengalaman beternak/bertani cukup tinggi rata-rata 23,16 tahun dengan umur produktif rata-rata 44,76 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa mulai usaha tani/ternak dimulai sejak usia rata-rata 25 tahun. Dari hasil regresi berganda diperoleh $Y=23.6+0.059X1-0.582X2+0.599X3-0.0987X4 +0.157X5$ dimana faktor-faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan adalah pendidikan petani dan pengalaman beternak/bertani dari hasil uji t masing-masing -5,55 dan 6,20 ($P>0.05$).

Oleh karena itu, pemanfaatan proses/teknologi tepat guna dalam pengolahan produk pangan lokal perlu dilakukan sehingga diperoleh produk pangan yang

memenuhi kriteria makanan gizi seimbang dan aman, serta dapat disimpan lebih lama. Perlunya target capaian yang jelas dengan perencanaan mulai dari budidaya (hulu) hingga pemasaran produk (hilirnya) secara holistik dan terintegrasi.

Untuk mendukung diversifikasi pangan, direkomendasikan dengan substitusi bahan impor, diperlukan cara penyajiannya yang menarik selera konsumen. Pengembangan produk lokal perlu didukung industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi tepat-guna dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pengembangan pemasaran, khususnya untuk tepung terigu/gandum dengan memanfaatkan produk lokal seperti sagu, singkong, ubi jalar dan sebagainya, mocaf misalnya. Untuk menunjang keberhasilan diversifikasi pangan, mocaf sebagai substitusi tepung impor diproses menjadi berbagai produk makanan, seperti: mie dan beraneka produk roti dan biskuit, yang didukung dengan penyajian yang menarik.

STRATEGI DAN UPAYA PROGRAM KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN EKONOMI HASIL PRODUK PERTANIAN

Pertahanan pangan diartikan: dapat terpenuhinya kebutuhan asal pangan dengan yang cukup tersedia, mudah diperoleh, halal dan aman dikonsumsi, dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan subsistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Diversifikasi produk yang dihasilkan juga menutup kerugian yang terjadi di satu produk dan mendapatkan keuntungan di produk lainnya. Berbagai jenis bahan pangan yang dikonsumsi menjadi makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia seperti: ubikayu, jagung, ataupun sagu, pada umumnya disuplementasi dengan sayur dan daging atau ikan yang cukup, sehingga tidak kalah dengan hidangan berdasarkan bahan makanan pokok beras/nasi.

Diversifikasi umumnya merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi dampak negatif atau resiko yang dihadapi oleh pengusaha; dimana beberapa faktor utama diversifikasi usaha hasil pertanian dan peternakan didukung oleh: kebijakan pemerintah untuk pengembangan usaha; ketersediaan input yang sangat memungkinkan untuk diperoleh, dengan dukungan pendistribusian yang efektif, efisien dan tepat sasaran; keberadaan dan ketersediaan berbagai lembaga pendukung (lembaga pembiayaan, lembaga pendistribusian dan pemasaran, dan sebagainya); stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan yang sangat cukup baik dan terjamin, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan secara memadai dan kualitas konsumsi yang sehat dan aman dikonsumsi; serta dukungan ketersediaan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan akses lainnya terkait bahan baku berbasis pertanian dan peternakan.

Implementasi pelaksanaan berbagai program guna peningkatan ketahanan pangan dipengaruhi oleh: *Pertama*: Peningkatan mutu intensifikasi dan produktivitas melalui: upaya penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam rangka peningkatan teknologi spesifik

lokasi; *Kedua*: Perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dan penggunaan bibit unggul; *Ketiga*: Pemeliharaan dan pengamanan produksi melalui: teknologi produksi, panen dan pasca pan yang tepat; *Keempat*: Rehabilitasi dan konversi serta pemanfaatan lahan kosong agar menghasilkan; *Kelima*: Konsumsi karbohidrat pengganti dari substitusi bahan pangan hasil pertanian; *Keenam*: Pemeliharaan ternak yang dapat menunjang keberhasilan usahanya, sehingga para peternak dapat mensubsidi kebutuhan asal ternak untuk kepentingan bersama masyarakat (pedesaan dan kota).

Ketidakseimbangan antara pola konsumsi pangan dengan ketersediaan (produksi) pangan di masyarakat merupakan permasalahan utama diversifikasi pangan. Terjadinya perubahan penawaran dan permintaan tanaman pangan non beras merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan program diversifikasi yaitu: (1) implikasi terhadap diversifikasi produksi tanaman pangan (diversifikasi pertanian); dan (2) implikasi terhadap diversifikasi konsumsi tanaman pangan (diversifikasi pangan).

Diversifikasi pangan merupakan konsep yang terpadu dan memadukan berbagai perangkat kebijakan, dan tidak berdiri sendiri. Diversifikasi pangan terkait erat dengan diversifikasi tanaman pangan, dimana diversifikasi pangan melihat dari sisi konsumsi sedang diversifikasi tanaman pangan melihat dari sisi produksi. Dengan demikian, program diversifikasi telah mengubah peranan komoditas non pangan beras terhadap perekonomian nasional melalui dua sisi, yaitu: produksi sekaligus konsumsi.

Pada ranah nasional, kedaulatan pangan diartikan sebagai kemampuan dalam negeri suatu bangsa atau negara untuk memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan sehat (higienis), serta aman. Keterjaminan tersebut berbasiskan optimalisasi pemanfaatan dan keragaman sumberdaya lokal, yang tercermin oleh indikator secara mikro dan makro. Indikator secara mikro adalah keterjangkauan pangan secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga, sedangkan secara makro adalah ketersediaan dan kontinuitas pangan, terdistribusi dan terkonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang, baik pada tingkat wilayah maupun pada tingkat nasional.

Untuk memantapkan produksi padi dan diversifikasi pangan, diperlukan strategi melalui pembenahan kelembagaan pangan, diantaranya adalah kelembagaan kelompok tani dan KUD. Hal tersebut dilakukan karena kelompok tani dapat berperan di sektor produksi, distribusi, pengolahan dan konsumsi. Sedangkan KUD sebagai unsur pendukung kelembagaan keuangan dan perekonomian di pedesaan serta sebagai sarana penyediaan kredit, sarana produksi, serta dapat bertindak sebagai pengolah dan pemasaran hasil (Amang. 1995).

Revitalisasi pembangunan kelembagaan pertanian menghendaki pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan yang menyangkut perubahan berbagai aspek yang membentuk perilaku. Lemahnya kapasitas dan kinerja kelembagaan pedesaan yang dibentuk nilai-nilai tradisional

diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja perekonomian di pedesaan (Elizabeth, 2007a).

Diperlukan strategi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional dengan mengurangi terbentuknya: (i) hubungan interdependensi (kemitraan) kelembagaan yang sangat asimetris; (ii) agar dapat menguntungkan perbaikan kualitas ketenagakerjaan (SDM) petani; (iii) menghindari pendekatan kebijakan perancang pembangunan yang bersifat sentralistik (*top down*), *centrally planned economies* (Kozminski, 1990; *dalam*: Elizabeth, 2008) dan monolitik; serta (iv) menumbuhkan kesan dapat berkembang dan mengakar pada adat, kebudayaan dan *local knowledge* masyarakat setempat. Hal tersebut dimulai dari masyarakatnya agar menjadi: (i) esensial untuk mencapai kesinergisan optimum dalam aktivitasnya di tingkat lokal; (ii) dapat membantu dan memudahkan petani mengembangkan sistem kelembagaan pedesaan berbasis produk pertanian; dan (iii) mengupayakan pertanian ke arah industrialisasi (Elizabeth. 2011).

Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan tradisional di pedesaan perlu menekankan pengembangan berbagai aspek pendukung, diantaranya: (i) Agar dapat mengaplikasi dan mengembangkan teknologi inovatif berbasis produk pertanian, maka pembentukan kelembagaan lebih ditujukan untuk distribusi bantuan dan bukan hanya peningkatan kualitas SDM masyarakat pedesaan; (ii) Tujuan pembentukan kelembagaan tidak hanya terfokus upaya peningkatan produksi pertanian jangka pendek yang di lapang cenderung hanya pada penerapan teknologi produksi; (iii) Semakin lemahnya kelembagaan harus dipandang sebagai penghambat, dimana pembentukan kelembagaan lebih memperkuat ikatan horizontal dan vertikal, sehingga pengenalan inovasi teknologi berimbang antara pendekatan non-material (kelembagaan) dengan material; (iv) Terkait pemberdayaan dan pengembangan perilaku dan tindakan masyarakat, pengembangan kelembagaan seharusnya lebih ke pendekatan kultural dari struktural; (v) Pembinaan kelembagaan cenderung tidak hanya bersifat individual (*trickle down effect*) misalnya pembinaan kontak-kontak tani hanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian; serta (vi) Terfokus pada aspek teknologi dalam perancangan kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat pedesaan (Saptana dan Elizabeth. 2004; *dalam*: Elizabeth. 2008).

Dengan demikian, menurut, pendukung utama terlaksananya strategi tersebut dalam upaya pencapaian ketahanan pangan, kedaulatan pangan, serta diversifikasi pangan sangat diperlukan ketersediaan perangkat kebijakan yang memadai, teknologi dan informasi yang dibutuhkan (Elizabeth, R 2007a), serta berfungsinya lembaga pendukung lainnya seperti: penyuluhan, pemasaran, dan sistem pendekatan instansi terkait (Elizabeth, R. 2015).

Pemasaran, sebagai salah satu subsistem aktivitas bisnis dari produk hasil agroindustri, diarahkan pada perbaikan mekanisme penentuan harga yang layak bagi produsen dan pelaku pemasaran. Pengkajian pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang umum berlaku dalam aktivitas agribisnis, terutama pemasaran hasil produk agroindustri (Elizabeth, R., 2015).

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya (Elizabeth, 2008). Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, antara lain berupa kebutuhan: fisik, rasa aman (*safety*), hubungan sosial (*social affiliation*), pengakuan (*esteem*), pengembangan pengakuan (*self actualization*) (Elizabeth, 2007b). Diversifikasi pangan akan berjalan lancar bila dipadukan dengan pengembangan agroindustri berbahan baku produk hasil pertanian domestik (lokal), dan sebaiknya dibangun di daerah-daerah pedesaan. Dengan tambahan harapan bahwa strategi ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan dapat mendorong pencapaian dan berkembangnya perekonomian di pedesaan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan kebijakan pemerintah yang lebih fokus dan berpihak. Kebijakan diperlukan untuk memberi ruang yang lebih besar, karena diperlukan strategi sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan skala rumah tangga. Tingkat pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan dan menjadi salah satu faktor kunci bagi rumah tangga untuk menjadi salah satu ukuran kemampuan dalam mengakses konsumsi pangan yang dibutuhkan beserta keragamannya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Tujuan utama pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang sangat terkait dengan ketahanan pangan, karena keterkaitan tersebut merupakan suatu agenda yang tidak pernah berakhir (*the unfinished agenda*). Secara definisi ketahanan pangan merupakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari segi jumlah dan mutunya.
2. Aspek konsumsi (diversifikasi pangan) yang sangat erat dengan kepentingan nasional (pemerintah). Aspek produksi (diversifikasi tanaman pangan) yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan petani dalam berusaha tani, sebagai strategi dalam upaya pencapaian dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dimana keduanya dapat berjalan secara simultan.
3. Untuk mencapai kedaulatan pangan, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam yang bahan bakunya berasal dari produk domestik, baik sebagai bahan diversifikasi pangan yang paling mendasar, maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan. Strategi tersebut bertujuan sebagai upaya mengurangi dan memperkecil perolehan bahan baku yang berasal dari impor.
4. Perlunya dukungan kebijakan pemerintah yang lebih fokus dan berpihak untuk pencapaian dan pengembangan diversifikasi dan kedaulatan pangan, sangat diperlukan ketersediaan perangkat kebijakan yang memadai, teknologi dan informasi yang dibutuhkan, serta berfungsinya lembaga pendukung lainnya seperti: penyuluhan, pemasaran, dan sistem pendekatan instansi terkait.

5. Diversifikasi pangan akan berjalan lancar bila dipadukan dengan pengembangan agroindustri berbahan baku produk hasil pertanian domestik (lokal) yang dibangun di pedesaan.
6. Diperlukan strategi sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan skala rumah tangga. Tingkat pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan dan menjadi salah satu faktor kunci bagi rumahtangga untuk menjadi salah satu ukuran kemampuan dalam mengakses konsumsi pangan yang dibutuhkan beserta keragamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B. 1995. Kebijakan Pangan Nasional. Penerbit PT. Dharma Karsa Utama Jakarta. Cetakan I.
- Elizabeth, E. 2007. Reorientasi dan Peran Kearifan Lokal Dalam Akselerasi Inovasi Sistem Integrasi Tanaman Ternak mendukung Ketahanan Pangan di Pedesaan. Keamanan Produk Pangan Hewani di Indonesia. Prosiding Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Produk Pangan Hewani dalam Rangka Pemenuhan Gizi Masyarakat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor, 21 Nopember 2007, hal. 139-153.
- Elizabeth, R. 2007a. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Forum Agro Ekonomi (FAE) Vol.25 Juli 2007. PSE-KP. Bogor.
- Elizabeth, R. 2007b. Diagnosa Dinamika Rasionalitas Masyarakat Peysan Tradisional Sebagai Titik Awal Pembangunan Pedesaan. Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal Dari Desa. BBP2TP. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Elizabeth, R. 2008. Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Pedesaan. Jurnal SOCA. Vol. 8. No. 2. Juli 2008. hal. 58- 64. Jur. Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Udayana. Bali.
- Elizabeth, R. 2008a. Restrukturisasi Pemberdayaan Kelembagaan Pangan Mendukung Perekonomian Rakyat Di Perdesaan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Prosiding Simposium Tanaman Pangan V, 28–29 Agustus 2007. Puslitbang Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Elizabeth, R. 2008b. Penguatan dan Pemberdayaan Peran Pembangunan Perekonomian, Sistem Pasar dan Kelembagaan: Dilema Dilema Kemiskinan dan Kelaparan di Perdesaan. Prosiding Seminar Nasional: “Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan.” BPTP Maluku Ambon, 29-30 Oktober 2007. BPTP Maluku Ambon. Balitbang. Departemen Pertanian. 2008.

- Elizabeth, R. 2011. Strategi Pencapaian Diversifikasi Dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan Dan Kenyataan. Jurnal IPTEK Des. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Elizabeth, R. 2015. Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional Menjadi Strategi Pencapaian Kedaulatan Pangan. Antara Harapan – Kenyataan. Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan. Tema: Indonesia Menuju Swasembada Pangan Dalam Tiga Tahun Kedepan: “Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris”. Kendari, 9 Maret, 2015.
- Sofjan. S. 2000. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor 18-19 September 2000.hal. 17-20.